

PELUNCURAN GNKAU DI PALEMBANG

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (empat kiri atas), bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (tiga kiri atas), Walikota Palembang Harnojoyo (dua kiri atas), dan Tokoh nasional putra daerah Helmi Yahya (kiri atas) berfoto sambil menunjukkan kartu e-money untuk pembayaran angkutan umum pada peluncuran Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum (GNKAU) di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Bumi Sriwijaya Palembang, Sumsel, Minggu (27/2). Sebanyak 5.000 kartu e-money pembayaran angkutan umum dibagikan kepada pelajar dan mahasiswa sekaligus diresmikannya pengoperasian kendaraan umum penghubung ke stasiun LRT di Palembang.



FOTO/ANT

Penuhi Standar Kualitas, Industri Pengolahan Buah Tembus Pasar Sejumlah Negara

Putu Juli Ardika mengemukakan, industri pengolahan buah dalam negeri diyakini sudah mampu memenuhi permintaan pasar luar negeri terutama dari segi kualitas. Salah satu perusahaan yang patut diapresiasi adalah PT Fruit Ing Indonesia karena telah mengembangkan pasarnya ke beberapa negara tujuan ekspor seperti Spanyol, Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan Korea Selatan.

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian senantiasa mendukung pelaku industri pengolahan buah untuk memperluas pasar ekspornya. Hal ini karena industri pengolahan buah memiliki kontribusi yang signifikan bagi sektor manu-

faktur, terutama industri agro. Pada tahun 2021, nilai ekspor industri pengolahan hortikultura, yang di dalamnya termasuk industri pengolahan buah, mencapai USD383 juta. Nilai tersebut meningkat 22,79% dibanding tahun se-

belumnya sebesar USD312 juta.

"Beberapa industri pengolahan buah sudah berorientasi ekspor semenjak awal mula berdiri. Bahkan, pada tahun 2021 nilai ekspor industri agro mencapai USD64,55 miliar, yang di antaranya juga disumbangkan oleh industri pengolahan buah," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika dilansir dari laman Kemenperin, Senin (28/2).

Saat ini, di Indonesia terdapat enam industri pengolahan buah antara skala kecil dan menengah, dengan total kapasitas produksi sebesar 5.500 ton per tahun. Sementara itu, di sektor hilirnya, terdapat 41 perusahaan dengan total kapasitas produksi mencapai 430.000 ton per tahun.

Putu mengemukakan, industri pengolahan buah dalam negeri diyakini sudah mampu memenuhi permintaan pasar luar negeri terutama dari segi kualitas. Salah satu perusahaan yang patut diapresiasi adalah PT Fruit Ing Indonesia karena telah mengembangkan pasarnya ke beberapa negara tujuan ekspor seperti Spanyol, Amerika Serikat, Jepang,

Singapura dan Korea Selatan.

"Berapa waktu lalu, kami telah melakukan kunjungan kerja ke PT Fruit Ing Indonesia di Gresik, Jawa Timur. Kami melihat langsung proses produksi di sana cukup baik, dengan standar dan teknologi yang digunakan. Kami juga mengapresiasi karena perusahaan ini mampu menembus pasar dari negara-negara yang terkenal dengan persyaratan yang ketat," paparnya.

Dalam produksinya, menurut Putu, industri pengolahan buah dalam negeri pada umumnya sudah bermitra dengan kelompok petani atau koperasi buah lokal untuk mendapatkan bahan bakunya. Kemitraan merupakan salah satu bentuk upaya industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku, meningkatkan pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya lokal serta ikut berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani.

"Kami dari pemerintah mendorong industri pengolahan buah dalam negeri untuk menjalin kemitraan dengan petani lokal untuk meningkat-

kan kesejahteraan petani dan mendukung program substitusi impor," terang Putu.

Managing Direktor PT Fruit Ing Indonesia, Iwan Winardi menyampaikan bahwa selain memproduksi *end product*, perusahaannya juga memproduksi produk antara (*intermediate products*) yang menjadi bahan baku bagi industri hilir berupa *puree buah*, *dried fruit*, dan *individual quick frozen (IQF) food*.

Produk antara pengolahan buah memiliki peluang pengembangan yang besar. Dengan volume produksi buah segar yang besar, dapat diproses menjadi produk antara untuk memenuhi kebutuhan sektor hilir dalam rangka mengurangi impor.

Potensi buah dalam negeri dengan jumlah produksi sangat besar yang perlu diolah lebih optimal, antara lain pisang dengan jumlah produksi 7,2 juta ton per tahun, mangga (2,6 juta ton), jeruk siam (2,4 juta ton), nanas (1,8 juta ton), dan pepaya (887 ribu ton). • dro



IDN/ANTARA

PENYEBAB KENAIKAN HARGA DAGING SAPI
Pembeli membayar daging sapi kepada penjual di PD Pasar Jaya Kramat Jati, Jakarta, Minggu (27/2). Kementerian Perdagangan mengatakan kenaikan harga daging sapi yang mencapai Rp150 ribu per kilogram daripada sebelumnya Rp90 ribu per kilogram, dipicu adanya salah satu negara pengekspor sapi ke Indonesia yakni Australia yang mulai membatasi ekspor menjadi hanya 40 persen dari jumlah normal.

Bank Mandiri Eksekusi Transaksi ESG Repo Perdana di Indonesia

JAKARTA (IM) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengeksekusi program diversifikasi instrumen pembiayaan berkelanjutan melalui pendanaan jangka panjang (*wholesale funding*) dalam *framework environmental, social and governance (ESG)* melalui transaksi *repurchase agreement* atau *repo* senilai total US\$500 juta dengan dua counterparty, yang salah satunya Standard Chartered Bank Indonesia.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan menjelaskan hal itu merupakan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung Presiden G20 2022 yang sekaligus menjadi landmark transaction sebagai transaksi ESG repo pertama di Indonesia dan salah satu first movers di Asia Tenggara.

Bank Mandiri sebagai penjual repo berkomitmen untuk menyalurkan dana yang diterima untuk membiayai ataupun membiayai kembali proyek-proyek pada kawasan lingkungan (*green*) dan sosial dengan kriteria yang mengacu kepada kerangka kerja obligasi berkelanjutan Bank Mandiri.

"Transaksi ESG repo ini merupakan inisiatif strategis, tidak hanya untuk memperkuat struktur pendanaan perseroan dalam mendukung rencana ekspansi bisnis, namun juga

untuk mengimplementasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB) pada pilar sustainable banking secara konsisten," ujar Panji di Jakarta, Senin (28/2).

Pada 2021, Bank Mandiri juga telah menerbitkan obligasi berkelanjutan perdana senilai US\$300 juta untuk proyek-proyek yang digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek-proyek berwawasan lingkungan dan sosial.

Sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, lanjut Panji, Bank Mandiri berkomitmen terus menjalankan praktik keuangan berkelanjutan dengan menyusun RAKB yang diimplementasikan melalui tiga pilar strategis.

"Ketiga pilar itu adalah Sustainable Banking, Sustainable Operations, dan Sustainable Corporate Social Responsibility (CSR) & Financial Inclusions. Salah satu inisiatif dalam pilar Sustainable Banking adalah pengembangan sustainable product and services. Pada tahun ini, Bank Mandiri telah berhasil melakukan transaksi ESG repo," kata Panji.

Lebih jauh Panji mengatakan, pertumbuhan pada ESG bonds berkembang sangat pesat dari 2015 dan terjadi kenaikan yang sangat signifikan pada obligasi sosial semenjak pandemi Covid-19. • hen

Dukung Ekonomi Digital, Ini yang Dilakukan BUMN

JAKARTA (IM) - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya untuk turut serta mendukung perkembangan ekonomi digital dengan membangun infrastruktur hingga memberikan akses pendanaan.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury dalam Forum Ekonomi Merdeka secara daring di Jakarta, Senin (28/2), mengatakan upaya tersebut merupakan cara BUMN untuk turut membangun ekosistem ekonomi digital di era digitalisasi saat ini. "Kita berupaya jadi bagian dari ekosistem dan juga jadi sumber pendanaan," katanya seperti dilansir Antara.

Pahala menjelaskan, dulu Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) fokus memberikan pinjaman kepada perusahaan dan UKM. Namun, dengan sistem digital yang akan dibangun ke depan, Himbara juga perlu memberi pendanaan dalam bentuk modal ventura den-

gan fleksibilitas.

Diungkapkan Pahala, Kementerian BUMN telah meluncurkan Merah Putih Fund untuk mendukung pendanaan perusahaan rintisan (*startup*) dalam negeri agar mampu menjadi unicorn. "Kita harap Merah Putih Fund bisa melahirkan *soonicorn*, calon-calon unicorn dan betul-betul asli Indonesia sehingga investor swasta bisa turut masuk dan sinergi dengan fund yang dikelola Himbara dan Telkom ini," katanya.

Lebih jauh Pahala mengatakan ekonomi digital Indonesia ditargetkan bisa mencapai lebih dari 10 persen PDB nasional pada 2025 mendatang.

Target tersebut memaksa para pemain di Indonesia agar tidak hanya jadi penonton tetapi betul-betul menjadi pemain yang punya ekosistem sendiri dan mampu bersaing secara

global.

"Untuk itu kita harus persiapkan diri dengan cara melakukan pengembangan infrastruktur dan peran BUMN khususnya dalam pengembangan infrastruktur, misal terkait dengan jaringan fiber," katanya.

Selain itu, BUMN ikut membangun digital platform di berbagai bagian dan produk layanan dengan memastikan pemain lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pahala menambahkan poin penting lainnya dalam perkembangan ekonomi digital adalah talenta atau sumber daya manusia (SDM). "Pada 2030, dengan perkembangan digital ekonomi yang terus meningkat, kami melihat kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi digital juga akan sangat meningkat. Bahkan diperkirakan akan mencapai 17 juta tenaga kerja yang dibutuhkan di 2030 mendatang," katanya. • hen



IDN/ANTARA

KONTRIBUSI UMKM PEREMPUAN UNTUK EKONOMI NASIONAL

Parajin menyelesaikan pembuatan dompet dengan teknik sosopo transparante di Nichi Craft, Depok, Jawa Barat, Senin (28/2). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari 65 juta unit UMKM yang ada di Indonesia sebagian besar kontribusi dari UMKM yang dijalankan oleh perempuan yaitu sekitar 52,9 persen usaha mikro, 50,6 persen sektor usaha kecil dan 34 persen usaha menengah.



IPO, Nanotech Bakal Lepas 29,99% Saham

JAKARTA (IM) - Pasar modal Indonesia bakal kembali kedatangan perusahaan baru. PT Nanotech Indonesia Global Tbk (NIG) bersiap diri untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kami optimistis setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) kinerja perseroan akan bertumbuh signifikan. Selain, tentu saja meningkatkan *good corporate governance (GCG)* perseroan," kata Komisaris Utama PT Nanotech Indonesia Global Tbk, Nurul Taufiq Rochman dalam keterangan tertulis, Senin (28/2).

NIG berencana melantai di BEI dengan mekanisme penawaran umum perdana saham (*initial public offering/IPO*). Perseroan akan melepas 1.285.000.000 saham atau setara dengan sekitar 29,99%.

Mengutip prospektus perseroan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi akan digunakan untuk belanja modal atau (*capital expenditure (Capex)*). Selain itu, akan digunakan untuk modal kerja atau (*operational expenditure (Opex)*) dalam rangka mendukung kegiatan usaha perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku.

Capex itu di antaranya untuk pembelian mesin dan perlengkapan terkait jasa

layanan teknologi berbasis rekayasa material (teknologi rekayasa) perseroan dalam rangka menunjang *strategic business unit (SBU)* properti dan konstruksi. "Peluang bisnis properti dengan konsep teknologi nano amat potensial," kata Nurul.

Dia menambahkan, hunian yang dibangun mengungkap konsep *smart home*, *smart material*, serta ramah teknologi. "Misal, menggunakan cat anti nyamuk serta diintegrasikan dengan teknologi digital," paparnya.

Direktur Utama PT Nanotech Indonesia Global Tbk, Suryandaru menjelaskan, potensi bisnis yang digelar perseroan amat potensial, termasuk di tengah pandemi Covid-19 saat ini. "Karena itu, kami optimistis pendapatan dan laba akan meningkat signifikan. Bahkan, ekuitas kami bisa naik empat kali lipat," kata Suryandaru.

Nanotech Indonesia Global berdiri sejak tahun 2019 dan bergerak di bidang jasa layanan teknologi riset dan pengembangan, rekayasa material dan nanoteknologi. Bisnis perseroan terus bertumbuh dan saat ini memiliki lima *Strategic Business Unit (SBU)* yang fokus untuk mencari solusi untuk pelanggan perseroan sesuai dengan kebutuhan pelanggan di bidangnya masing-masing. • dot

Kemenperin Akselerasi Program Substitusi Impor Melalui Layanan Jasa Industri

JAKARTA (IM) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus mengakselerasi program substitusi impor dengan menginisiasi berbagai kebijakan strategis. Salah satu langkah nyatanya adalah melalui pelayanan jasa industri yang selama ini dilakukan oleh Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin.

"Kami telah menargetkan program substitusi impor sebesar 35% hingga tahun 2022. Di tengah dampak kondisi pandemi saat ini, kami masih optimistis penguatan industri dalam negeri tetap berjalan untuk mencapai target tersebut," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dilansir dari laman Kemenperin, Senin (28/2).

Agus menyebutkan, sejumlah upaya yang telah dijalankan, antara lain memacu kontribusi industri dalam negeri dalam setiap rantai nilai konsumsi pasar domestik, baik dari sektor hulu untuk bahan baku dan bahan penolong hingga produk-produk jadi yang langsung dikonsumsi masyarakat. "Sehingga setiap kebutuhan permintaan pasar domestik dipenuhi oleh industri dalam negeri, bukan terus-menerus bergantung pada impor," tegasnya.

Pada Rapat Kerja BSKJI Kemenperin, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin Dody Widodo menyampaikan, BSKJI Kemenperin juga telah mengeluarkan kebijakan dan program layanan jasa industri yang bertujuan memberikan jaminan mutu industri melalui sertifikasi dan pengawasan, meningkatkan daya saing industri melalui penerapan teknologi industri termasuk implementasi industri 4.0, serta

meningkatkan keberlanjutan industri melalui penerapan prinsip industri hijau.

"Untuk mewujudkan program substitusi impor, saat ini BSKJI telah memiliki layanan jasa industri seperti layanan sertifikasi produk, sertifikasi sistem manajemen, pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, uji profesiensi, konsultasi jasa industri, sertifikasi industri hijau dan layanan pemeriksa halal," ungkap Dody.

Lebih lanjut, Kepala BSKJI Dody Rahadi mengemukakan, standarisasi industri memegang peranan penting dalam mendukung program substitusi impor, di mana standarisasi dapat memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan serta kelestarian lingkungan hidup.

"Selain itu, melindungi pasar dalam negeri dari produk impor berkualitas rendah (*trade barrier*), menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan transparan, serta memacu kemampuan inovasi dan meningkatkan kepastian usaha," ujarnya.

Dody menambahkan, program prioritas yang digunakan BSKJI di antaranya penyusunan dan pengawasan standarisasi industri, penguatan fasilitas laboratorium penunjang SNI, pemanfaatan teknologi dan jasa industri melalui dana kemitraan, serta pendampingan pascainkubasi. "Selanjutnya, kami juga melakukan pendampingan transformasi INDI 4.0, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi industri hijau, serta mendukung pembangunan fasilitas produksi fitofarmaka dan fasilitas terpadu teknologi proses industri ekstrak bahan alam," paparnya. • pan